

Pendidikan Sejarah dalam Kurikulum di Republik Federal Jerman: *A Lesson Learned*

Oleh : Kurniawati

Pendidikan Sejarah PPS UNJ

Abstract

The aim of this article is to find out what philosophy behind the education curriculum in Germany, its system and structure especially on history curriculum to be compared with Indonesia's experience. Traditionally the German educational system is strongly influenced by the tradition of naturalistic humanism - specifically those of the Humboldt philosophy regarding as Bildung. History Education is a compulsory subject that is given to students from grade 6-10 as much as two hours of lessons per week, while in grade 10-12 or 13 lessons, history is no longer a compulsory subject. In grade 6-9 curriculum is based on chronological history revolves around the history of Western Civilization, in grade 10 history lessons relating to contemporary history in the 20th century, while in grade 11-12 / 13 history lesson focused on the history of modern Europe and non- European history.

Key words: curriculum, history, history education, bipartite, tripartite, bildung, humanism, naturalistic

Abstrak

Tujuan dari artikel adalah mengetahui filosofi kurikulum Jerman, sistem dan strukturnya terutama dalam kurikulum sejarah. Secara tradisional sistem pendidikan Jerman sangat dipengaruhi oleh tradisi humanisme-naturalistik terutama dari aliran filsafat Humboldt mengenai Bildung. Pelajaran sejarah merupakan pelajaran wajib yang diberikan kepada siswa dari grade 6-10 sebanyak dua jam pelajaran perminggu sedangkan pada kelas 10-12 atau 13 pelajaran sejarah tidak lagi menjadi pelajaran wajib. Pada grade 6-9 kurikulum sejarah disusun berdasarkan kronologis berkisar pada sejarah Peradaban Barat, pada grade 10 pelajaran sejarah berkaitan dengan sejarah kontemporer pada abad ke-20 sedangkan pada grade 11-12/13 pelajaran sejarah difokuskan pada sejarah Eropa Modern dan sejarah non- Eropa.

Kata Kunci: kurikulum, sejarah, pendidikan sejarah, bipartit, tripartit, bildung, humanisme, naturalistic

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting jika tidak dikatakan sebagai faktor yang terpenting dalam suatu negara. Kemajuan suatu negara sangat berkaitan dengan kemajuan tingkat pendidikan di negara tersebut. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya pendidikan bertujuan menghasilkan manusia-manusia unggul yang akan menjadi tulang punggung pembangunan suatu bangsa. Untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu negara maka suatu kurikulum disusun

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pada dasarnya juga harus mengakomodasi kemajuan zaman sehingga menjadi suatu hal yang jamak jika kurikulum diperbaharui setiap kurun waktu tertentu. Akan tetapi penerapan suatu kurikulum di suatu negara sangat tergantung pada perpolitikan yang sedang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian suatu kurikulum haruslah *politically accepted*.

Pendidikan Sejarah adalah salah satu bidang pengajaran yang sangat terpengaruh dengan politik yang berkuasa di suatu negara. Pendidikan di Jerman merupakan salah satu contohnya. Jerman merupakan salah satu negara yang mempunyai "beban" sejarah terutama berkenaan dengan masa-masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kekalahan perang membuat Jerman terbelah menjadi Jerman Barat yang menganut sistem kapitalis dan Jerman Timur yang menganut sistem komunis. Reunifikasi Jerman pada 1990 memberikan tantangan tersendiri bagi Jerman terutama di bidang pendidikan dan pendidikan sejarah mengenai pembekalan apa yang harus diberikan kepada siswa yang akan mewarisi Jerman di masa depan.

Jerman tahun 1945 merupakan negara yang terkoyak akibat kekalahan yang dideritanya dalam Perang Dunia II. Jerman yang kuat dan agresif pada masa pemerintahan NAZI pimpinan Hitler pun di bawah kendali sekutu. Daerah-daerah di Jerman pun dibagi-bagi di antara negara sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Uni Soviet. Pada tahun 1949, akibat semakin kuatnya rivalitas antara Amerika Serikat yang berhaluan kapitalis dan Uni Soviet yang komunis berimbas kepada Jerman. Pada 1949 bagian Jerman yang diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis bergabung menjadi Republik Federal Jerman yang berhaluan liberal-kapitalis. Pada tahun yang sama pula bagian Jerman yang diduduki Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman yang berhaluan komunis.

Pembangunan selanjutnya di Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman mengikuti selera negeri induk masing-masing. Di RFJ, partai-partai politik seperti CDU yang

beraliran liberal dan SPD yang beraliran sosialis diperbolehkan untuk berdiri. Usaha-usaha untuk de-Nazifikasi dilakukan tetapi berbeda dengan yang terjadi di zona pendudukan Uni Soviet, usaha menghilangkan pengaruh NAZI di wilayah pendudukan Barat di Jerman tampak ragu-ragu karena sepanjang seorang yang dipekerjakan sekutu terutama yang berkaitan dengan administrasi dapat melakukan fungsinya dengan baik maka latar belakang NAZI yang dimilikinya tidak terlalu menjadi persoalan. Namun begitu, para pemimpin NAZI yang dianggap bertanggungjawab pada Perang Dunia II tetap dibawa ke pengadilan di Nuremberg untuk diadili. RFJ atau dikenal juga sebagai Jerman Barat dibagi menjadi negara-negara bagian. Pada tahun 1949 terbit Undang-Undang Federal yang menyatakan bahwa negara bagian dan bukan pemerintah federal yang bertanggungjawab terhadap pendidikan. Terjadi perdebatan di kalangan partai-partai besar yaitu CSU dan SPD mengenai pendidikan. CSU menginginkan tujuan dan kegiatan pendidikan itu bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat sehingga penting untuk menyiapkan lulusan yang berkualitas. Sementara seterusnya Partai SPD menginginkan pendidikan sebagai hak azasi yang menekankan pada usaha pendidikan itu atas inisiatif sendiri, persamaan dan tindakan pengimbalan.

Di RDJ, Uni Soviet menempatkan Georgii Zhukov sebagai pemimpin di sana yang segera menasionalisasi semua bank dan pabrik-pabrik yang masih tersisa dan juga menerapkan pertanian kolektif "ala Uni Soviet" di RDJ. Partai-partai politik yang ada dilarang karena hanya dimungkinkan satu partai tunggal yaitu Partai Persatuan Sosialis (SED) yang berhaluan komunis. Untuk membasmi

sisa-sisa kekuatan NAZI, banyak pengikut-pengikut NAZI yang dikirim ke kamp-kamp untuk di re-edukasi dan bahkan dieksekusi. Semua lapisan masyarakat dari pelajar, pekerja atau buruh dan wanita diwajibkan menjadi anggota organisasi yang berorientasi pada SED. Kurikulum baru diperkenalkan dengan menekankan ajaran Marxisme-Leninisme. Model pendidikan mengacu kepada Uni Sovyet seperti prinsip “pengajaran politeknik”. Negara mengontrol dengan ketat segala hal yang berhubungan dengan masyarakat termasuk pendidikan untuk memastikan terlaksananya masyarakat sosialis. Akibatnya peningkatan di bidang pendidikan lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif meskipun terjadi perubahan sejak tahun 1980an ketika pemerintah Jerman Timur mulai meningkatkan kualitas pendidikan negaranya sesuai dengan situasi yang berkembang di dunia internasional.

Tahun 1989 merupakan tahun yang paling krusial terutama bagi dua Jerman dan negara-negara blok Timur seiring dengan kolapsnya rezim komunis di Eropa Timur. Jatuhnya rezim komunis di Jerman Timur diiringi keinginan rakyat Jerman Timur untuk bersatu dengan Jerman Barat. Sementara itu, penyatuan kembali Jerman juga menjadi isu yang tidak pernah hilang di Jerman Barat meskipun hanya sedikit yang memperkirakan hal tersebut dapat terwujud dengan cepat. Pada 9 November 1989, Tembok Berlin yang menjadi lambang pemisahan kedua negara sekaligus batas blok Barat dan Timur runtuh. Setelah negoisasi yang panjang antara pihak Jerman Barat dan Jerman Timur dan 4 kekuatan besar pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet yang dikenal dengan two plus four formula, unifikasi Jerman pun resmi terjadi pada tanggal 3 Oktober 1990.

Unifikasi Jerman membawa perubahan besar dalam sistem politik terutama bagi wilayah bekas Jerman Timur yang harus menyesuaikan dengan wilayah bekas Jerman Barat. Dalam pembukaan undang-undang tentang sekolah khusus ditetapkan tujuan umum pendidikan dengan tekanan pada pengembangan individualitas dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Jerman bersatu mengadopsi sistem liberal yang diterapkan di bekas RFJ, dewasa ini merupakan negara dengan luas 356.957 kilometer persegi dengan penduduk lebih dari 80 juta orang merupakan salah satu negara dengan wilayah terluas dan ekonomi terkuat dan jumlah penduduk terbesar di Eropa. Makalah ini ingin menjawab pertanyaan Apa yang menjadi landasan filosofis kurikulum Jerman, bagaimana sistem dan struktur kurikulum Jerman, bagaimana pelajaran sejarah dalam struktur kurikulum Jerman dan bagaimana pengalaman Jerman dibandingkan dengan Indonesia.

KAJIAN TEORETIK

Sejarawan Inggris Collingwood (1985: xxxix-xliii) mengatakan bahwa sejarah adalah suatu bentuk penelitian atau inquiri. Sejarah menurutnya adalah sains sehingga memungkinkan di dalamnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian berusaha mencari jawabannya. Oleh karena sejarah adalah sains maka ia mempunyai bentuk pemikiran yang khusus sehingga untuk menjawab sifat, objek, metode serta bentuk pemikiran haruslah ahli-ahli sejarah dan mempunyai pengalaman dalam pemikiran sejarah.

Rowse (2014:34) mendefinisikan sejarah sebagai catatan kehidupan manusia di masyarakat dalam lingkungan

geografi dan fisik mereka. Unsur manusia dengan demikian adalah hal yang memegang peranan penting karena hanya kehidupan manusia yang dapat dicatat sebagai sejarah.

Pendidikan Sejarah menurut Hasan (2012:89-90) merupakan media yang paling ampuh dalam memperkenalkan masa lampau dan tantangan yang mereka hadapi kepada siswa dengan demikian mereka mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa masa lampau tersebut pada masa sesudahnya dan juga pada masa kini.

Kochhar (2010:10-11) mengatakan bahwa pembelajaran sejarah bersifat kronologis, yang merupakan kunci dalam memahami masa lalu dan masa sekarang.

Pendidikan sejarah dengan demikian dapat disimpulkan sebagai suatu cara memperkenalkan masa lampau atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau secara kronologis sehingga siswa dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa masa lampau itu pada masa sesudahnya dan juga pada masa kini.

Kurikulum menurut Pelegrino (2004:26) terdiri dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan dalam lingkup mata pelajaran-mata pelajaran (*subject matters*) di mana guru mengajar dan siswa belajar.

Tujuan utama kurikulum menurut McKernan (2008:4) adalah *...to enable student to think and to make critically informed choices*, memungkinkan siswa berpikir dan membuat pilihan-pilihan yang benar-benar ia telah memiliki pengetahuan yang mendalam atau kritis mengenainya.

Dua pendapat mengenai kurikulum itu mempunyai dua benang merah

bahwa kurikulum adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam bentuk mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa-siswa sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenainya yang pada gilirannya mereka diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengetahuan mendalam yang dimilikinya tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kepustakaan. Zed (2008:1-2) mengatakan bahwa penelitian pustaka atau *library research* adalah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Kurikulum

Setelah reunifikasi, RFJ melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pengaruhnya terutama dirasakan oleh penduduk yang tadinya berada di wilayah Jerman Timur yang komunis. Sistem pendidikan Jerman adalah sistem bi-partite (kemudian hari menjadi sistem *tri-partite*) yaitu *Hauptschule* dan *Gymnasium*. Sistem pendidikan Jerman memiliki akar panjang hingga pada Abad Pertengahan di mana pendidikan merupakan lembaga yang banyak memengaruhi pendidikan warga di Jerman. Pengaruh gereja baru berkurang sejak abad ke-17 ketika secara resmi pendidikan dianggap tanggungjawab negara. Selain gereja pendidikan di Jerman juga sangat dipengaruhi oleh dua tradisi pengetahuan yaitu humanisme dan naturalisme. Pandangan humanisme-naturalis ini didasarkan pada

humanisme Humboldt-seorang filsuf berpengaruh di Jerman. Utamanya adalah konsep Humboldt tentang *Bildung* yaitu "pengertian rasional" tentang tatanan dunia. Pandangan filosofis ini menekankan pada penyatuan pengetahuan akademik dengan pendidikan moral yang bersifat individualistis. Penekanan pada rasional tampak pada pentingnya matematika dan sains, sedangkan pendidik diharapkan juga bertindak sebagai pendidik moral bagi siswanya. Tradisi pengetahuan yang berkembang di Jerman tersebut berpengaruh pada sistem pendidikan Jerman yang mengenal sistem merefleksikan pandangan naturalistik di mana guru diharapkan menerapkan pendekatan berorientasi ke siswa dan menyiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan, sementara *Gymnasium* merefleksikan pandangan humanistik. Sistem tri-partit diperkenalkan pada tahun 1964 di Jerman Barat dengan diperkenalkannya *Realschule*. *Realschule* menerapkan kurikulum yang sama bagi seluruh negara bagian berbeda dengan *Hauptschule* dan *Gymnasium* yang kurikulumnya diserahkan kepada masing-masing negara bagian dan sekolah-sekolah.

Sistem federasi yang dianut oleh RFJ mengacu kepada *Basic Law* atau *Grundgesetz* yang mengatur bahwa setiap negara bagian *lander* mempunyai kedaulatan sendiri dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan tetapi tetap mempunyai tanggungjawab bersama untuk saling bekerja sama dalam kerangka negara federasi. Sejak 1990, RFJ terdiri dari 16 *lander* yang masing-masing negara bagian tersebut mempunyai konstitusinya sendiri yang tidak bertentangan dengan *Basic Law*. Konsekuensi dari sistem negara bagian ini menyebabkan kurikulum pendidikan di Jerman ditentukan oleh menteri-menteri

pendidikan negara bagian yang terdiri dari tiga instrumen yaitu tabel berisi jumlah jam belajar perminggu, mata pelajaran sesuai dengan "grade" dan jenis sekolah, pedoman kurikulum dan pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks. Mata pelajaran utama di sekolah tingkat dasar secara umum adalah membaca, menulis, aritmatika, *sachunterricht* yaitu pelajaran yang mengenalkan siswa pada ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, seni, musik, olahraga dan pendidikan agama. Pada tingkat sekolah menengah pada umumnya meneruskan mata pelajaran pada tingkat dasar ditambah dengan paling sedikit satu bahasa asing, ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial.

Kurikulum di Jerman dihubungkan dengan dua hal yaitu didaktik dan *Lehrplan*. Didaktik berhubungan dengan teori-teori pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan dan materi pelajaran sehingga tidak langsung dihubungkan dengan strategi pembelajaran. Meskipun kurikulum merekomendasikan metode mengajar tertentu, guru dipersilahkan mengembangkan sendiri metode pembelajaran yang dirasakan tepat oleh mereka. Namun, dengan semakin kecilnya rasio guru dan siswa di Jerman yang saat ini rata-rata 1:15 maka kecenderungan metode mengajar yang digunakan adalah *student-centered*.

Sementara itu *lehrplan* adalah silabus yang merupakan acuan langsung bagi guru dalam pembelajaran sehari-hari. Di dalamnya hanya berisi definisi dari tujuan dan spesifikasi dari mata pelajaran. Tujuan umum kurikulum pendidikan di Jerman ditentukan oleh peraturan sekolah yang dapat tersirat dalam suatu mukaddimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus terdapat dalam pedoman kurikulum yang ditentukan oleh negara

bagian. Pedoman kurikulum biasanya dibuat oleh tim ahli yang ditunjuk yang seringkali melibatkan universitas atau lembaga-lembaga penelitian.

Bahasa Jerman merupakan bahasa yang dipergunakan dalam pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dengan pengecualian di beberapa sekolah swasta yang menerapkan kelas bilingual. Pengecualian juga ditujukan kepada kelompok minoritas Denmark di Schleswig-Holstein yang dapat memilih sekolah swasta khusus *Erzatzschulen* yang menjadikan bahasa Denmark sebagai bahasa utama. Minoritas Sorbia yang tinggal di daerah Bradenburg dan Sachsen juga termasuk yang mendapat pengecualian. Kurikulum di setiap negara bagian seperti telah dijelaskan di atas, dapat berbeda-beda karena setiap negara bagian mempunyai otonomi dalam pendidikan. Namun begitu, untuk koordinasi dan harmonisasi antarnegara bagian diadakan sebuah forum pertemuan yaitu *Kultusminister Konferenz* (KMK).

Sistem dan Struktur Kurikulum

Wajib sekolah di Jerman adalah 9-10 tahun sejak anak berusia 6 tahun yang disediakan pemerintah secara gratis. Pendidikan dasar (*Grundschule*) berlangsung selama 4 tahun (6 tahun di Berlin dan di beberapa negara bagian grade/kelas 5-6 dilaksanakan di lembaga perantara yang mempersiapkan siswa masuk ke sekolah menengah). Bagi anak-anak usia wajib belajar yang memilih untuk tidak belajar penuh waktu misalnya memilih home schooling maka usia wajib belajar hingga berusia 18 tahun. Pada usia 6 tahun, semua anak memasuki *grundschule* atau sekolah dasar di masing-masing wilayah yang menerapkan sistem yang sama. Pada akhir *grade* 4 siswa memasuki sekolah

menengah pertama yang merupakan fase orientasi dalam tipe sekolah yang berbeda atau *orientierungsstufe*. Pada masa sekolah menengah pertama ini siswa dipersiapkan untuk memasuki program-program yang dianggap sesuai dengan minat dan bakatnya dengan yaitu *Hauptshule*, *Realschule*, *Gymnasium*, atau *Gesamtschule*. Transisi dari sekolah dasar ke salah satu tipe sekolah dapat berbeda-beda menurut negara bagian. Keputusan untuk memasuki salah satu tipe sekolah ditentukan oleh penilaian sekolah dasar dengan persetujuan orang tua. Keputusan untuk memasuki tipe sekolah juga ditentukan oleh pemegang kebijakan pendidikan dan kriteria yang telah ditentukan.

Hauptshule merupakan program lanjutan bagi siswa yang akan melanjutkan ke sekolah kejuruan. Sekolah ini mengarahkan siswa untuk magang setelah mendapatkan ijazah tamat belajar. Sejak tahun 1960 tren siswa mengambil *haupshule* semakin menurun karena anak yang mengambil program ini sering mendapat pandangan miring dari masyarakat mengingat sekolah ini cenderung menerima siswa dengan nilai rendah atau mereka yang berasal dari kalangan imigran. Bagi siswa yang memperoleh nilai baik atau nilai rata-rata maka mereka dapat memasuki program *realschule*. Sekolah ini mempersiapkan siswa sebagai pegawai atau buruh kelas menengah.

Bagi siswa yang berprestasi tinggi maka *Gymnasium* merupakan pilihan utama bagi siswa dari sekolah dasar. Tujuan utama bagi siswa *Gymnasium* adalah melanjutkan pendidikan hingga level perguruan tinggi. Jika pada grade 5-10 tekanan pelajaran setiap sekolah berbeda-beda (misalnya dalam bahasa dan

program-program seni) maka mulai *grade* 11 siswa mulai memilih spesialisasi dalam bidang bahasa, seni, ilmu-ilmu sosial (pendidikan kewarganegaraan, sejarah atau geografi, agama atau filsafat) dan bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Pada *grade* 12/13 siswa menjalankan ujian akhir yang nilai akhirnya dapat menjadi syarat untuk memasuki program-program tertentu misalkan kedokteran meskipun secara umum tidak ada kaitan antara spesialisasi atau pilihan siswa pada sekolah menengah dengan pilihan studinya di pendidikan tinggi.

Di negara bagian yang dikuasai oleh Partai SPD, sejak 1970 berusaha untuk mereformasi sistem pendidikan dengan menciptakan *gesamtschule* untuk pendidikan tingkat menengah. *Gesamtschule* (sekolah komprehensif) ingin menghilangkan kompleksitas sistem pendidikan tri-partite (*Haupschule*, *Realschule* dan *Gymnasium*) di Jerman sehingga dalam *gesamtschule* dimungkinkan siswa memilih tiga jalur berbeda di dalam satu sekolah. Akan tetapi sistem *gesamtschule* tidak terlalu populer karena mendapat tentangan orang tua, persatuan guru dan Partai CDU. Dewasa ini alih-alih menyederhanakan kerumitan sistem pendidikan Jerman, *Gesamtschule* justru menambah kerumitan dalam sistem pendidikan di Jerman. Beberapa *Gesamtschule* disebut juga sebagai *Ganztagsschulen* atau *all-day schools* karena jam belajarnya yang lebih lama daripada sekolah-sekolah tradisional.

Pembiayaan pendidikan wajib dibagi diantara lander dan pemerintah lokal yang merupakan tradisi sejak abad ke-19. Pemerintah lokal bertanggungjawab pada pengeluaran eksternal sekolah seperti membangun gedung sekolah dan perawatannya, peralatan dan fasilitas sekolah, bahan-bahan pengajaran,

pembukaan dan penutupan sekolah-sekolah, pengeluaran operasional, pengeluaran untuk staf-non guru dan bantuan finansial untuk siswa. Lander bertanggungjawab pada urusan internal seperti menentukan kurikulum sekolah, *prerequisite*, isi dan struktur sistem, penilaian dan pelatihan guru, alokasi dan pembayaran gaji guru. Sekolah swasta pembiayaan terbesarnya tidak ditanggung dana publik tetapi aturan mengenainya sangat bervariasi dari satu lander ke lander lainnya. *Basic Law* sendiri pada prinsipnya melarang diskriminasi terhadap siswa.

Untuk sistem penilaian atau evaluasi yang dilaksanakan di Jerman, berkisar pada rentang 1-6. Nilai 1 untuk nilai yang terbaik dan 6 untuk nilai yang terburuk. Penilaian berdasarkan ujian tertulis dengan kontribusi ujian lisan lazim dilakukan di semua level pendidikan. Jika dianggap tidak memenuhi standar, siswa dapat diminta untuk mengulang kelas yang sama. Pada umumnya guru merupakan pihak yang paling menentukan dalam penilaian siswa. Pada akhir masa pendidikan menengah, siswa yang dianggap telah memenuhi standar mendapatkan sertifikat atau ijazah. Siswa di Jerman masuk sekolah selama antara 188-208 hari selama satu tahun akademik (Agustus-Juli) menurut aturan masing-masing lander dengan 6 minggu libur selama musim panas dan beberapa hari libur lainnya. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, pemerintah federal mengatur agar liburan di 16 negara bagian secara bergantian misalnya pada tahun ini liburan musim panas di Berlin dimulai pada bulan Juni sedangkan di Bavaria pada bulan Juli maka tahun berikutnya akan terjadi sebaliknya. Sekolah berlangsung 5 atau 6 hari seminggu dengan 17-23 jam pelajaran/minggu untuk

sekolah dasar, 28-30 jam pelajaran/minggu untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Masing-masing jam pelajaran berlangsung selama 45 menit. Untuk guru, jumlah jam mengajar pertahun adalah 613-959 jam.

Tradisi pendidikan tinggi di Jerman tidak membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswanya. Akan tetapi subsidi berat yang harus ditanggung pemerintah (termasuk kepada banyak mahasiswa asing) menyebabkan sejak 2004 mahasiswa diharuskan membayar biaya pendidikan antara \$500-650. Meskipun jumlah tersebut cukup rendah dibandingkan dengan biaya pendidikan tinggi di Amerika Serikat atau wilayah Eropa lain, kebijakan tersebut mendapat tentangan keras dan protes sehingga kebijakan ini dibatalkan atau direvisi di banyak negara bagian.

Terdapat dua jenis pendidikan tinggi di Jerman yaitu politeknik atau *fachhochschulen* dan Universitas. Sebagaimana sekolah menengah, sejak 1970-an ada usaha untuk menggabungkan sekolah politeknik dan universitas ke dalam satu institusi. Akan tetapi usaha tersebut tidak mendapat hasil yang diharapkan. Penggabungan yang berhasil dilakukan justru terjadi pada fakultas pendidikan guru yang digabungkan dengan universitas. Terjadi pula peningkatan beberapa fakultas pendidikan guru menjadi universitas. Sampai 2013 terdapat 427 institusi pendidikan tinggi di Jerman terdiri dari 108 universitas, 6 institusi pendidikan guru/*Pedagogische*

Hochschulen, 17 seminari, 52 sekolah seni, 215 institut teknik dan 29 institut pelatihan administrasi negara. Dari jumlah tersebut kurang dari 100 merupakan institusi swasta.

Pendidikan Sejarah dalam Struktur Kurikulum

Pelajaran sejarah merupakan pelajaran wajib yang diberikan kepada siswa dari grade 5/6-10 sebanyak dua jam pelajaran perminggu. Pelajaran sejarah ini pada praktiknya dapat pula dikombinasikan dengan pelajaran yang lain tergantung dari jenis sekolah. Pada kelas 10-12/13 pelajaran sejarah tidak lagi menjadi pelajaran wajib. Pada grade 6-9 kurikulum sejarah disusun berdasarkan kronologis berkisar pada sejarah peradaban Barat. Pada *grade* 10 pelajaran sejarah berkaitan dengan sejarah kontemporer pada abad ke-20. Pada grade 11-12/13 pelajaran sejarah difokuskan kepada sejarah Eropa modern dan sejarah non-Eropa seperti dekolonisasi dan topik-topik global lainnya. Sebagai ilustrasi pendidikan sejarah di Jerman khususnya di tingkat menengah, berikut topik-topik sejarah yang diajarkan di Sekolah Internasional Jerman di Serpong Tangerang:

GRADE/KELAS	POKOK BAHASAN
Grade 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar sejarah • Manusia di zaman prasejarah • Budaya tinggi di lembah • Dunia Yunani
Grade 6	<ul style="list-style-type: none"> • Asal-Usul orang Romawi • Roma pada waktu kekaisaran • Abad Pertengahan awal • Kerajaan Frankia yang besar
Grade 7	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan awal Jerman • Perkembangan sosial dan hidup di Abad Pertengahan • Perkembangan baru • Eropa dalam absolutism
Grade 8	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan di Inggris dan Amerika Utara • Revolusi Prancis dan Masa Napoleon • Restorasi dan Revolusi di Eropa • Industrialisasi dan tuntutan sosial di Inggris dan Jerman/ Eropa
Grade 9	<ul style="list-style-type: none"> • Kaisar Jerman dan Perang Dunia I • Akhir PD I dan kecendrungan dunia internasional • Republik Weimar • Munculnya nasional-sosialisme dan kekuasaan totalitarian
Grade 10	<ul style="list-style-type: none"> • Jerman, Eropa dan dunia pada Perang Dunia II • Dunia dan Jerman setelah Perang Dunia II hingga 1949 • Dari konfrontasi ke perdamaian antara Timur-Barat • Pertanyaan mengenai Jerman 1949-1990 dan solusinya • Dunia ketiga dan permasalahan global
Grade 11	<ul style="list-style-type: none"> • Mengulang materi grade 5-10 dengan penekanan pada periode 1945-1991 dan globalisasi dan permasalahan di dalamnya

Meskipun kurikulum di Jerman termasuk kurikulum pendidikan sejarahnya bervariasi, ilustrasi topik-topik dalam pendidikan sejarah dapat membenarkan pendapat Fuchs (2014) bahwa pendidikan sejarah di Jerman masih berorientasi pada sejarah nasional. Meskipun isi kurikulum sejarah di Jerman sudah sangat berubah dari yang chauvinistik pada era NAZI, tetapi menurutnya aspek sejarah dunia terutama yang di luar Eropa masih sangat sedikit porsinya. Perubahan kurikulum sejarah memang sudah dilakukan misalnya

dilakukan oleh negara bagian Baden-Wuerttemberg yang memperkenalkan *bildungsplan* atau rencana pembelajaran pada 2004. Kurikulum tersebut secara eksplisit telah menyatakan tujuan pembelajaran sejarah yaitu “pengambilalihan pengetahuan dasar tentang kejadian-kejadian penting, orang-orang, perkembangan-perkembangan, struktur-struktur, term-term, dan cerita kepahlawanan regional, nasional dan sejarah Eropa dan juga sejarah dunia.”

Lesson Learned

Berkaca dari pengalaman dan praktik kurikulum pendidikan khususnya dalam bidang sejarah Jerman maka dapat membandingkannya dengan pengalaman dan praktik yang dilakukan oleh Indonesia. Tidak berbeda jauh dengan Indonesia, pelajaran sejarah di Jerman terutama pada era NAZI sangat chauvinistis sehingga menghasilkan generasi yang chauvinistis pula. Pelajaran sejarah pada masa itu dengan demikian sangat dipengaruhi oleh politik dan memihak kepada rezim berkuasa. Pengalaman Jerman itu juga dialami Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dirumuskan Kurikulum Rentjana Peladjaran tahun 1964 yang menitik beratkan kepada pengembangan daya cipta, rasa dan karya dan moral yang dikenal sebagai Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena terdapat lima kelompok bidang studi yaitu kelompok pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmaniah. Pendidikan Sejarah yang diinginkan dalam Pendidikan Pancawardhana merupakan penjabaran Garis-Garis Besar Haluan Negara Indonesia saat itu yang sesuai dengan arahan Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Dengan demikian Pendidikan Pancawardhana mengacu pada Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Maka Pendidikan Sejarah pada masa ini ingin menggarisbawahi kebesaran masa lampau Indonesia pada masa Sriwijaya dan Majapahit dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian visi pendidikan sejarah pada kurikulum ini

adalah nasionalisme dengan penekanan yang tersirat pada anti imperialisme dan sosialisme. Orde Baru menggantikan Orde Lama sejak 1967 ingin mendekonstruksi tatanan yang telah ada sebelumnya termasuk dalam bidang pendidikan. Visi pendidikan sejarah pada masa Orde Baru yang terlihat pada kurikulum 1968, 1975, 1984, 2004 dan 2006 adalah nasionalisme yang menekankan pada Pancasila dan peran penting militerisme sebagai pemersatu bangsa dan yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya perpecahan. Pada masa Orde Baru, nuansa politik sangat kental dalam pemberian Pendidikan Sejarah terutama pada kurikulum 1984 (kurikulum 1975 yang disempurnakan) dengan diperkenalkannya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Pelaksanaan Pendidikan PSPB ini kemudian mendapat kritikan tajam karena dianggap sebagai indoktrinasi untuk mempertahankan rejim Orde Baru. Meskipun pelajaran PSPB bukanlah pelajaran sejarah yang tetap mendapat porsi jam pelajarannya sendiri-tetapi pandangan negatif turut ditanggung oleh pelajaran sejarah karena PSPB dianggap sarat dengan muatan sejarah.

Pendidikan PSPB yang sarat polemik akhirnya tidak dilanjutkan pada kurikulum 1994. Pendidikan sejarah pada kurikulum ini ingin mengedepankan pendekatan faktual, prosesual dan problematik. Pendidikan sejarah pada kurikulum 1994 ingin mewujudkan siswa yang dapat berpikir kritis dan analitis dengan memberi ruang yang besar bagi guru untuk mendesain pembelajarannya. Terdapat lompatan besar dalam kurikulum 1994 dari yang bertumpu pada guru (*teacher centered*) menjadi bertumpu pada siswa (*student centered*).

Namun begitu terdapat banyak permasalahan dalam penerapan kurikulum 1994 termasuk pada pendidikan sejarah misalnya dengan masih ditekankannya aspek faktual dan juga masih bertumpu pada guru (*teacher centered*). Kurikulum 1994 juga dinilai banyak kalangan terlalu berat dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari akibatnya pemerintah pun berupaya memperbaiki kurikulum tersebut dengan memberikan suplemen kurikulum 1999, Kurikulum 2004 (KBK) hingga Kurikulum 2006 (KTSP). Semuanya relatif tidak membawa perubahan signifikan kepada pendidikan sejarah karena bidang pelajaran tersebut tetap dianggap kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang tercermin dari pengalokasian jam pelajaran yang sangat tidak memadai.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang diluncurkan pada awal tahun 2013. Perubahan yang cukup signifikan pada pendidikan sejarah terjadi pada tahun 2013 dengan dikeluarkannya Kurikulum 2013. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 memperkenalkan empat kompetensi inti (KI) yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran yaitu KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 Pengetahuan dan KI 4 Keterampilan. Khusus untuk SMA mata pelajaran-mata pelajaran dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok mata pelajaran wajib dan kelompok mata pelajaran peminatan. Dengan adanya pemisahan kelompok mata pelajaran wajib dan peminatan tersebut maka terjadi pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam pelajaran tiap minggunya.

Kurikulum ini antara lain mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Tidak saja menekankan kepada aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik
- Berbeda dengan KTSP, pemerintah menyiapkan silabus, buku teks siswa, dan buku panduan guru.
- Menekankan pendekatan saintifik
- Berpusat pada siswa

Dalam kurikulum 2013, pendidikan sejarah mendapat perhatian lebih daripada kurikulum - kurikulum sebelumnya dengan dimasukkannya sejarah Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran wajib dan sejarah sebagai salah satu mata pelajaran wajib untuk peminatan Ilmu-Ilmu Sosial di tingkat SMA. Visi pendidikan sejarah pada kurikulum 2013 adalah pendidikan sejarah sebagai sarana untuk memupuk nasionalisme sekaligus kemampuan berpikir dan ketrampilan sejarah.

Dari uraian mengenai perkembangan kurikulum Indonesia termasuk di dalamnya kurikulum sejarah dapat dilihat bahwa tidak ada konsistensi dalam penerapan kurikulum karena masih lebih besarnya kepentingan politik dibandingkan visi besar yang ingin dicapai suatu bangsa. Jerman juga mengalami masalah yang sama dengan Indonesia tetapi kelebihan Jerman yang belum dimiliki Indonesia adalah landasan filosofis kuat pada pendidikan Jerman yaitu pandangan humanisme-naturalistik yang sudah menjadi tradisi yang mengakar. Begitu kuatnya pandangan ini sehingga ketika ada upaya untuk lebih menyerderhanakan sistem pendidikan dengan memperkenalkan model *gesamtschule*, upaya tersebut tidak mendapat sambutan cukup dari masyarakat Jerman.

KESIMPULAN

Pendidikan di Jerman dikatakan dipengaruhi oleh filsafat humanisme-naturalistik yang tercermin dalam pembagian jenjang pendidikan *haupschule* dan *gymnasium*. Otonomi yang sangat luas pada negara-negara bagian dalam menerapkan kebijakan pendidikan di Jerman menciptakan kompleksitas yang merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah federal dalam mengharmonisasikannya. Tidak mudah untuk mengubah tradisi pendidikan di Jerman yang sudah berusia ratusan tahun. Akan tetapi perubahan tuntutan zaman mengharuskan Jerman untuk terus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dalam pendidikan sejarah, penyesuaian juga dilakukan misalnya yang terjadi di negara bagian Baden Wuttenberg yang mulai memperkenalkan *Bildungplan*.

Dari sisi filsafat pendidikan, pendidikan sejarah di Jerman menurut hemat penulis secara umum memakai pendekatan filosofi tradisional romantik-naturalisme dan humanisme masih kuat dipegang di Jerman meskipun terlihat pula filosofi perennialisme juga tergambar dari susunan pokok bahasan pelajaran sejarah. Pendekatan filosofi romantik naturalisme memandang pendidikan harus disesuaikan dengan potensi setiap individu yang khas. Pendidikan dengan demikian juga dimaksudkan agar siswa mengenali diri sendiri dan kemudian menekuni apa yang menjadi minat dan bakatnya. Guru dipandang sebagai mentor yang memungkinkan potensi anak berkembang dan menjadi individu yang mandiri. Sejalan dengan filosofi romantik naturalisme, filosofi humanisme juga memandang siswa sebagai pusat sehingga pendidikan harus mengabdikan kepada bakat dan minat siswa,

sedangkan filosofi perennialisme adalah ingin mengembangkan rasa bangga terhadap prestasi masa lampau. Aspek perennialisme ini sangat tergambar pada pokok bahasan sejarah di grade 6 yang membahas kebesaran Kerajaan Frankia yang menjadi cikal bakal Jerman sekarang.

Mencermati apa yang terjadi di Indonesia khususnya dengan kurikulum sejarahnya dapat dilihat bahwa ternyata terdapat persamaan dan perbedaan. Indonesia dan Jerman mempunyai sejarah kuatnya kepentingan politik dalam kebijakan pendidikannya tetapi kuatnya filosofi pendidikan humanisme-naturalistik yang telah mengakar sejak berabad-abad lampau membuat pendidikan Jerman termasuk di dalamnya sistem dan kurikulum pendidikannya mempunyai identitas yang kuat yang pada gilirannya membentuk identitas masyarakat Jerman itu sendiri. Dapat dilihat bahwa meskipun politik turut memengaruhi kebijakan pendidikan di Republik Federal Jerman tetapi visi pendidikan tetap solid sepanjang masa.

Daftar Pustaka

- Coy, Jason P. *A Brief History of Germany*, New York: Fact on File Inc, 2011
- Collingwood, R.G. *Idea Sejarah* terjemahan Muhd. Yusof Ibrahim, Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985
- Fucht, Eckhardt. *Why Teach World History in School: Curriculum Reform in German Secondary Education*. <http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/3.3/fuchs.html> diakses pada 1 November 2014
- Hofman, R.H., et al. *Institutional Context of Education System in Europe A Cross-*

Country Comparison on Quality and Equity, New York:Kluwer, 2005

McGregor, Katherine E. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Yogyakarta:Penerbit Syarikat, 2008

McKernan, James. *Curriculum and Imagination: Process, Theory, Pedagogy and Action research*, New York, 2008

Nur, Agustiar Syah. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 2001

Luhulima, C.P.F. *Eropa Sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan sejarah dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Gramedia, 1992

Pepin, Birgit. *Curriculum, Cultural Tradition and Pedagogy: Understanding the Work of Teachers in England, France and Germany*, diunduh dari <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000872.htm> pada 1 November 2014

German School System <http://www.german-way.com/history-and-culture/education/the-german-school-system/> diakses pada 1 November 2014

Rowse, A.L. *Apa Guna Sejarah*, terjemahan Winda Primasari, Depok:Komunitas Bambu,2014

Syukur, Abdul. *Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis*, Disertasi, Depok: Universitas Indonesia, 2013.

Seel, Norbert M., Dijkstra, Sanne. *Curriculum, Plans and Processes in Instructional Design*, New Jersey: Taylor and Francis, 2004

Umasih. *Sejarah Pendidikan di Indonesia: Sebuah Telaah atas Perubahan Kurikulum Sejarah Indonesia Sekolah Menengah Atas (SMA) Thesis*, Depok:Universitas Indonesia,2000